



Gerakan Sosial Berbasis Gender di Media Sosial: Tinjauan Sosiologis terhadap Kampanye #MeToo dan #NikahMuda

Hayatun Nufus Caniago*

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan, Deli Serdang, Indonesia, 20371

Email: nhayatun170@gmail.com

Histori Naskah	Diserahkan	Direvisi	Diterima	Tersedia Online
	13 Januari 2025	05 Februari 2025	05 Februari 2025	01 Maret 2025

Abstract

Social media has become a new arena for the articulation of identity, struggle, and social change, including on gender issues. The #MeToo and #NikahMuda campaigns represent two gender-based social movements operating digitally, but with opposing orientations and narratives: one is emancipatory and critical of sexual violence, while the other tends to be conservative and promotes local religious or cultural values about early marriage. This study aims to analyze the dynamics of these two campaigns sociologically by exploring the construction of gender meanings constructed through social media and uncovering the terrain of contestation between modern and traditional values. The study uses a descriptive qualitative method with data collection techniques through social media observation, documentation of campaign posts, and literature studies. The analysis is conducted using the approach of new social movement theory and the social construction of gender. The results show that #MeToo functions as a medium of resistance against patriarchal structures and opens up space for victim narratives, while #NikahMuda emphasizes the idealization of women's roles in the domestic sphere and social reproduction. Both campaigns use visual strategies, emotional narratives, and religious/cultural symbolism to build legitimacy. However, #MeToo tends to disrupt dominant norms, while #NikahMuda seeks to affirm existing norms. In conclusion, social media has become a terrain for contesting the meaning of gender between emancipatory and conservative discourses, reflecting the complexity of power relations, identity, and values in contemporary digital society.

Keywords: New Social Movements; Social Media; Gender; #MeToo; #YoungMarriage

Abstrak

Media sosial telah menjadi arena baru bagi artikulasi identitas, perjuangan, dan perubahan sosial, termasuk dalam isu-isu gender. Kampanye #MeToo dan #NikahMuda merupakan dua representasi gerakan sosial berbasis gender yang beroperasi secara digital, namun dengan orientasi dan narasi yang berlawanan: satu bersifat emansipatoris dan kritik terhadap kekerasan seksual, sementara yang lain cenderung konservatif dan mempromosikan nilai-nilai keagamaan atau budaya lokal tentang pernikahan dini. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara sosiologis dinamika dua kampanye tersebut dengan menelusuri konstruksi makna gender yang dibangun melalui media sosial serta mengungkap medan kontestasi antara nilai-nilai modern dan tradisional. Penelitian menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui observasi media sosial, dokumentasi unggahan kampanye, dan studi pustaka. Analisis dilakukan dengan pendekatan teori gerakan sosial baru dan konstruksi sosial gender. Hasil penelitian

menunjukkan bahwa #MeToo berfungsi sebagai media resistensi terhadap struktur patriarki dan membuka ruang narasi korban, sementara #NikahMuda lebih menekankan idealisasi peran perempuan dalam lingkup domestik dan reproduksi sosial. Kedua kampanye sama-sama menggunakan strategi visual, narasi emosional, dan simbolisme religius/kultural untuk membangun legitimasi. Namun demikian, #MeToo cenderung bersifat disruptif terhadap norma dominan, sedangkan #NikahMuda berupaya mengafirmasi norma yang ada. Kesimpulannya, media sosial menjadi medan kontestasi makna gender antara wacana emansipatoris dan konservatif, mencerminkan kompleksitas relasi kuasa, identitas, dan nilai dalam masyarakat digital kontemporer.

Kata Kunci: Gerakan Sosial Baru; Media Sosial; Gender; #Metoo; #Nikahmuda

Pendahuluan

Media sosial telah menjadi medium utama dalam membentuk opini publik, membangun solidaritas, serta mengartikulasikan aspirasi kelompok sosial tertentu (Nazmi, Rahmi, and Harahap 2025). Kemunculan berbagai gerakan sosial berbasis gender di ruang digital mencerminkan perubahan signifikan dalam pola komunikasi sosial, di mana isu-isu yang sebelumnya terpinggirkan kini memperoleh ruang ekspresi yang lebih luas. Kampanye-kampanye yang menyoroti ketimpangan gender, kekerasan seksual, dan norma-norma patriarkis menemukan momentumnya melalui platform seperti Twitter, Instagram, dan Facebook (Harahap, Nazmi, and Yusuf 2025). Gerakan #MeToo, yang dimulai pada tahun 2017, merupakan contoh paling menonjol dari penggunaan media sosial sebagai alat mobilisasi dan penyadaran terhadap praktik kekerasan seksual yang kerap tidak terungkap. Gerakan ini menyoroti pentingnya pemberdayaan suara perempuan dan pembongkaran struktur kekuasaan yang menindas, serta menciptakan ruang digital yang memungkinkan para penyintas berbagi pengalaman secara terbuka (Armstrong and Mahone 2023).

Berbeda dengan #MeToo yang berbasis pada kritik terhadap sistem patriarki dan kekerasan seksual, kampanye #NikahMuda menyuarakan narasi yang berkebalikan dengan memperjuangkan nilai-nilai keagamaan dan sosial mengenai pernikahan dini sebagai solusi terhadap pergaulan bebas dan degradasi moral remaja. Kampanye ini, yang banyak didorong oleh tokoh agama, influencer muda, serta komunitas keagamaan, justru menguatkan konstruksi peran tradisional gender yang sering kali mengabaikan aspek kematangan emosional dan kesiapan psikologis individu yang menikah muda (Al Akash and Chalmiers 2021). Meskipun digagas sebagai gerakan moral, narasi yang dikembangkan oleh #NikahMuda tidak jarang menimbulkan polemik karena mengabaikan realitas struktural yang memengaruhi perempuan, seperti keterbatasan akses pendidikan, kerentanan terhadap kekerasan dalam rumah tangga, dan ketimpangan relasi kuasa dalam pernikahan.

Fenomena kontradiktif antara dua kampanye ini menunjukkan dinamika sosial yang kompleks dalam memaknai isu gender di ruang digital. Menurut Bao (2025),

lebih dari 70 persen pengguna media sosial di dunia menggunakan platform digital sebagai sumber informasi utama tentang isu sosial dan politik, termasuk isu-isu kesetaraan gender. Di Indonesia, Nurhayati dan Sukmono (2022) menyebutkan bahwa tingkat partisipasi warganet dalam kampanye sosial mengalami peningkatan signifikan, dengan Twitter menjadi salah satu platform yang paling aktif digunakan untuk membangun opini publik seputar isu perempuan dan keluarga. Hal ini menunjukkan bahwa media sosial tidak hanya menjadi arena komunikasi, tetapi juga ruang kontestasi ideologi dan nilai-nilai sosial. Gerakan #MeToo dan #NikahMuda merepresentasikan dua kutub gerakan sosial berbasis gender yang berbeda orientasi namun sama-sama mendapatkan legitimasi dan dukungan dari komunitas digital yang luas.

Kedua gerakan tersebut menghadirkan dilema sosiologis yang menarik untuk dianalisis. Di satu sisi, #MeToo mendorong transformasi sosial yang lebih egaliter dengan mengangkat pengalaman perempuan sebagai bentuk kritik terhadap relasi kuasa yang timpang. Di sisi lain, #NikahMuda justru memperkuat nilai-nilai patriarkis dalam balutan religiusitas dan moralitas yang diterima secara sosial. Keduanya mencerminkan benturan antara nilai progresif dan konservatif dalam memahami peran dan posisi perempuan di masyarakat. Pergeseran makna gender yang dibentuk melalui interaksi digital ini menjadi bagian penting dari diskursus sosial kontemporer, di mana identitas gender tidak lagi dibentuk semata oleh struktur sosial konvensional, melainkan juga oleh narasi-narasi yang dibangun secara kolektif di ruang maya. Perspektif sosiologis menjadi relevan dalam menganalisis dinamika ini, karena memungkinkan kajian yang lebih mendalam mengenai bagaimana struktur, agen, dan simbol-simbol budaya berperan dalam membentuk dan mengarahkan gerakan sosial berbasis gender di media sosial.

Kebutuhan untuk meneliti permasalahan ini semakin mendesak mengingat dampak langsung dari kedua gerakan tersebut terhadap pola pikir, perilaku, dan kebijakan publik terkait isu perempuan dan keluarga. Gerakan #MeToo telah mendorong munculnya regulasi dan kampanye institusional terkait pencegahan kekerasan seksual, sementara #NikahMuda memengaruhi opini publik dan bahkan kebijakan daerah terkait promosi pernikahan dini. Analisis terhadap kedua kampanye ini tidak hanya penting untuk memahami bagaimana narasi sosial dibentuk dan disebarluaskan, tetapi juga bagaimana narasi tersebut berdampak pada kehidupan nyata, khususnya perempuan sebagai kelompok yang paling sering menjadi subjek utama maupun objek dalam konstruksi gender. Kajian ini juga berkontribusi dalam menyoroti bagaimana media sosial berfungsi sebagai arena perlawanan sekaligus reproduksi norma sosial, yang dalam konteks gender dapat bersifat membebaskan atau justru mengekang.

Metode

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif analitis untuk mengkaji dinamika gerakan sosial berbasis gender yang muncul

dalam kampanye #MeToo dan #NikahMuda di media sosial. Sumber data utama berasal dari konten media sosial, khususnya unggahan, komentar, dan tagar yang berkaitan dengan kedua kampanye tersebut di platform seperti Twitter, Instagram, dan TikTok dalam kurun waktu tertentu. Selain itu, data sekunder diperoleh melalui studi pustaka yang mencakup jurnal ilmiah, artikel berita, laporan lembaga independen, dan dokumentasi digital yang relevan. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi daring (netnografi), dokumentasi digital, dan wawancara mendalam terhadap informan yang terlibat aktif atau terdampak oleh kampanye tersebut, seperti aktivis gender, pengguna media sosial, dan akademisi. Analisis data dilakukan dengan pendekatan interpretatif melalui teknik analisis isi (*content analysis*) untuk mengidentifikasi pola naratif, wacana dominan, serta bentuk partisipasi publik, yang kemudian ditafsirkan menggunakan teori gerakan sosial dan perspektif sosiologis kritis guna memahami makna, pengaruh, dan dinamika perubahan sosial yang dibawa oleh kampanye #MeToo dan #NikahMuda dalam ruang digital.

Hasil dan Pembahasan

Kampanye #MeToo: Suara Perlawanan terhadap Kekerasan Seksual

Gerakan #MeToo muncul sebagai respons kolektif terhadap maraknya kekerasan seksual dan pelecehan yang kerap terjadi di berbagai ruang sosial, khususnya dalam dunia kerja, hiburan, dan institusi kekuasaan. Asal-usul kampanye ini dapat ditelusuri pada tahun 2006 ketika aktivis Tarana Burke pertama kali memperkenalkan ungkapan “Me Too” sebagai bentuk empati dan dukungan kepada perempuan kulit hitam yang menjadi korban pelecehan seksual (Gibson et al. 2019). Namun, kampanye ini mulai memperoleh perhatian global pada tahun 2017 setelah aktris Alyssa Milano menyerukan penggunaan tagar #MeToo di media sosial untuk mengungkapkan pengalaman kekerasan seksual secara publik, menyusul terungkapnya skandal Harvey Weinstein di industri film Hollywood (Zeng 2020).

Figur publik seperti Rose McGowan, Ashley Judd, dan Asia Argento turut memberikan dorongan signifikan terhadap masifnya gerakan ini dengan mengisahkan pengalaman mereka sebagai korban, yang secara simbolis membuka ruang bagi ribuan perempuan dan laki-laki di berbagai negara untuk mengemukakan penderitaan yang selama ini disimpan dalam diam (Franssen 2020). Keterlibatan tokoh-tokoh terkenal menjadikan gerakan ini tidak hanya sebagai bentuk ekspresi personal, tetapi juga sebagai mobilisasi sosial yang menggugah kesadaran publik terhadap sistem patriarki yang melanggengkan budaya kekerasan seksual.

Narasi pengalaman korban dalam kampanye #MeToo menjadi elemen sentral yang mengikat solidaritas di antara para penyintas. Dengan memanfaatkan kekuatan media sosial, para korban secara terbuka membagikan kisah-kisah kekerasan seksual yang mereka alami, baik dalam bentuk pelecehan verbal, pelecehan fisik, pemerkosaan, maupun eksploitasi kuasa dalam relasi kerja dan

sosial. Penggunaan media digital memungkinkan suara-suara marginal untuk menembus batas-batas geografis dan struktural yang selama ini menutupi pengalaman perempuan sebagai korban. Narasi yang dibangun tidak hanya memperlihatkan kerentanan perempuan dalam sistem sosial yang timpang, tetapi juga memperkuat posisi korban sebagai subjek aktif dalam perjuangan hak asasi. Keterbukaan ini menghadirkan efek domino berupa solidaritas lintas gender dan generasi, yang ditandai dengan meningkatnya dukungan moral dan advokasi hukum bagi para penyintas. Kampanye ini juga memunculkan semangat kolektif untuk melakukan perubahan struktural terhadap sistem hukum, budaya kerja, dan representasi sosial yang selama ini tidak berpihak kepada korban (Harahap et al. 2025).

Solidaritas gender yang tercipta melalui gerakan #MeToo membentuk ruang baru bagi artikulasi feminisme kontemporer yang menekankan pentingnya pengalaman hidup sebagai basis pembentukan kesadaran kritis. Kehadiran laki-laki sebagai pendukung gerakan juga menunjukkan adanya pergeseran paradigma terhadap peran gender dalam perjuangan melawan kekerasan seksual. Banyak tokoh publik laki-laki yang secara terbuka mengakui keikutsertaannya dalam menciptakan atau membiarkan budaya patriarkal berlangsung, dan kemudian berkomitmen untuk menciptakan lingkungan yang lebih aman dan setara. Solidaritas tersebut memperlihatkan bahwa perjuangan melawan kekerasan seksual bukan semata urusan perempuan, tetapi merupakan persoalan kemanusiaan yang membutuhkan keterlibatan semua pihak (Muslikhati 2004). Selain itu, gerakan ini juga mendorong wacana mengenai intersectionality, yaitu kesadaran bahwa perempuan dari latar belakang ras, kelas, dan orientasi seksual yang berbeda memiliki pengalaman yang bervariasi terhadap kekerasan, sehingga memerlukan pendekatan yang lebih inklusif dan adil.

Tantangan yang dihadapi kampanye #MeToo sangat kompleks dan tidak terlepas dari reaksi balik yang muncul baik secara individual maupun institusional. Sebagian kalangan menuduh gerakan ini sebagai bentuk “perburuan penyihir” modern yang merusak reputasi laki-laki tanpa proses hukum yang jelas, sementara yang lain mempertanyakan validitas klaim korban dengan narasi skeptisisme yang membingkai perempuan sebagai manipulatif atau berlebihan. Bentuk *backlash* ini seringkali diproduksi oleh media konservatif atau tokoh-tokoh yang memiliki kepentingan dalam mempertahankan status quo patriarkal. Bahkan, tidak jarang para penyintas yang bersuara mengalami kembali reviktimisasi melalui serangan siber, ancaman hukum, atau pengucilan sosial. Resistensi terhadap kampanye #MeToo juga terlihat dalam upaya merelatifkan bentuk kekerasan seksual dan mengaburkan batas antara konsensualitas dan pemaksaan, yang justru memperkuat impunitas pelaku dan memperlemah keberanian korban untuk bersuara (Gibson et al. 2019).

Benturan antara upaya pembebasan yang dibawa oleh kampanye #MeToo dan sistem sosial patriarkal yang mengakar memperlihatkan bahwa perjuangan untuk keadilan gender tidaklah mudah. Namun demikian, gerakan ini telah membuka ruang dialog yang luas mengenai relasi kuasa dalam masyarakat dan pentingnya menciptakan sistem sosial yang menjamin rasa aman dan setara bagi semua individu. Efek jangka panjang kampanye ini terlihat pada perubahan kebijakan di berbagai institusi, seperti penerapan kode etik yang lebih ketat, penguatan mekanisme pelaporan kekerasan seksual, serta pengarusutamaan isu kesetaraan gender dalam pendidikan dan budaya populer. Meskipun perjalanan #MeToo masih menghadapi hambatan struktural dan ideologis, semangat kolektif yang dibangun melalui narasi korban, dukungan figur publik, dan solidaritas lintas gender menjadi fondasi penting bagi perubahan sosial yang berkeadilan. Gerakan ini menandai titik balik dalam perjuangan panjang melawan kekerasan seksual dan menjadi pengingat bahwa suara perempuan memiliki kekuatan untuk mengubah dunia ketika didengarkan dan dihargai secara bermartabat.

Kampanye #NikahMuda: Antara Romantisme, Agama, dan Kontestasi Gender

Kampanye #NikahMuda merupakan fenomena sosial digital yang berkembang pesat di kalangan generasi muda, khususnya di media sosial seperti Instagram, TikTok, dan YouTube. Kampanye ini tidak hanya merepresentasikan pilihan gaya hidup, tetapi juga merefleksikan pergeseran nilai-nilai keagamaan, norma keluarga, serta konstruksi gender dalam masyarakat kontemporer. Kampanye ini banyak dimotori oleh sejumlah aktor yang berperan aktif dalam menyebarkan narasi, membentuk opini publik, serta mempengaruhi perilaku sosial khalayak muda (Stier et al. 2018). Aktor utama dalam kampanye ini meliputi influencer media sosial, tokoh agama, dan komunitas keluarga muda yang secara kolaboratif atau terpisah mengampanyekan pernikahan dini sebagai solusi atas berbagai persoalan moral dan sosial. Influencer, khususnya yang berstatus sebagai pasangan muda yang telah menikah, memanfaatkan popularitas dan jangkauan media sosial untuk memproduksi konten visual yang mengandung unsur romantisme, keintiman spiritual, dan narasi kesuksesan hidup melalui pernikahan dini. Mereka sering menampilkan kehidupan pernikahan sebagai ruang ideal untuk mendekatkan diri kepada Tuhan, memperkuat identitas Muslim yang taat, serta sebagai strategi menghindari maksiat (Lall, Mehra, and Narayan 2023).

Tokoh agama memainkan peran legitimatif dalam kampanye ini dengan mengutip ayat-ayat Al-Quran dan hadis yang menekankan keutamaan pernikahan, serta menyampaikan ceramah yang menekankan pentingnya menikah sebagai bentuk kesempurnaan iman. Pendekatan dakwah yang digunakan sering kali bernuansa normatif dan didaktik, menekankan urgensi pernikahan dalam rangka menghindari zina dan menyelamatkan moral generasi muda. Sementara itu, komunitas keluarga muda menjadi penguat narasi kampanye melalui kegiatan berbasis komunitas seperti seminar, majelis taklim, pelatihan pranikah, dan

aktivitas sosial lainnya yang bertujuan menciptakan ekosistem sosial yang mendukung pernikahan di usia muda. Komunitas ini mengangkat nilai kebersamaan, kemandirian, serta spiritualitas keluarga sebagai daya tarik utama, sekaligus sebagai simbol resistensi terhadap gaya hidup liberal yang dianggap merusak tatanan keluarga (Ritonga et al. 2023).

Narasi utama yang dibangun dalam kampanye #NikahMuda berpusat pada kesalehan individu dan kolektif, penyelamatan moral bangsa, serta pemaknaan peran gender yang berlandaskan pada nilai-nilai agama. Kesalehan digambarkan tidak hanya sebagai pencapaian spiritual, tetapi juga sebagai identitas sosial yang harus ditunjukkan secara performatif melalui kehidupan rumah tangga yang harmonis, beradab, dan sesuai syariat. Penyelamatan moral menjadi argumen utama dalam kampanye ini, di mana pernikahan dini dijadikan solusi atas meningkatnya pergaulan bebas, pornografi, aborsi, dan degradasi akhlak (Nazmi et al. 2025). Dalam narasi ini, perempuan seringkali didefinisikan sebagai penjaga kehormatan keluarga, sedangkan laki-laki sebagai pemimpin rumah tangga yang bertanggung jawab secara spiritual dan material. Pola relasi ini menegaskan pembagian peran gender yang tradisional dan hierarkis, serta membingkai pernikahan sebagai jalan utama menuju kematangan emosional, religiusitas, dan stabilitas hidup (Is, Harahap, and Eddien Sharief 2025).

Kendati kampanye #NikahMuda tampak ideal secara nilai dan spiritual, terdapat kritik yang kuat dari perspektif feminis yang mempertanyakan idealisasi pernikahan dini, khususnya terhadap dampak psikologis, sosial, dan struktural yang ditimbulkan. Kritik feminis menyoroti bagaimana narasi kampanye ini kerap mengabaikan realitas kompleks yang dihadapi oleh pasangan muda, seperti kematangan emosional yang belum tercapai, ketidakstabilan ekonomi, ketimpangan kekuasaan dalam rumah tangga, serta keterbatasan akses terhadap pendidikan dan pekerjaan bagi perempuan. Narasi kesalehan dan penyelamatan moral dalam kampanye ini dinilai menyederhanakan masalah seksualitas dan relasi gender, serta memperkuat subordinasi perempuan melalui glorifikasi peran istri yang taat, sabar, dan tidak menuntut. Ideal-ideal spiritual yang dikampanyekan tidak jarang menutup ruang bagi perempuan untuk menyuarakan aspirasi dan otonominya, karena setiap bentuk resistensi terhadap peran domestik kerap diposisikan sebagai bentuk ketidaktaatan terhadap nilai agama.

Kritik feminis juga mengungkap bahwa kampanye #NikahMuda cenderung menggunakan pendekatan simbolik yang menutupi ketimpangan struktural dalam masyarakat. Ketika pernikahan dini dipromosikan sebagai solusi tunggal, narasi ini secara tidak langsung mengabaikan pentingnya reformasi pendidikan seksual, pemberdayaan ekonomi perempuan, serta penguatan sistem perlindungan sosial yang inklusif dan berbasis kesetaraan gender. Dalam konteks tersebut, kampanye ini justru berpotensi melanggengkan ketidakadilan dengan membingkai pernikahan bukan sebagai hasil pilihan sadar individu yang matang, melainkan sebagai respons

terhadap ketakutan moral yang dibentuk secara sosial dan keagamaan. Kritik feminis menuntut adanya pendekatan yang lebih holistik dalam memahami isu pernikahan dini, yang tidak hanya menekankan aspek spiritual dan moral, tetapi juga mempertimbangkan dimensi hak asasi, keadilan gender, dan kesejahteraan jangka panjang (Bwirire et al. 2022).

Refleksi terhadap kampanye #NikahMuda menunjukkan bahwa fenomena ini tidak dapat dilepaskan dari dinamika sosial-keagamaan, perkembangan teknologi komunikasi, serta konstruksi identitas generasi muda yang mencari makna hidup dalam dunia yang semakin kompleks. Kampanye ini menyentuh ranah yang sangat personal, yakni relasi cinta dan keimanan, tetapi juga memiliki implikasi sosial yang luas terhadap cara masyarakat memahami keluarga, peran gender, dan hak individu. Oleh karena itu, perlu dilakukan kajian kritis yang komprehensif dan interdisipliner terhadap kampanye semacam ini agar tidak terjebak pada romantisasi simbolik yang menutupi kompleksitas struktural, serta agar wacana pernikahan muda dapat dikaji secara lebih adil dan berperspektif emansipatoris.

Komparasi Sosiologis antara #MeToo dan #NikahMuda

Gerakan sosial berbasis gender seperti #MeToo dan #NikahMuda mencerminkan dinamika sosiologis yang berbeda secara fundamental, terutama ketika ditinjau melalui lensa ideologi, struktur modal sosial, afiliasi kelas dan gender, serta dampak sosial yang ditimbulkan. Gerakan #MeToo lahir sebagai ekspresi progresif yang menantang struktur kekuasaan patriarkal dan menuntut transformasi kultural atas norma-norma yang selama ini menormalisasi kekerasan seksual dan pelecehan terhadap perempuan. Gerakan ini berangkat dari kesadaran kritis terhadap ketimpangan relasi kuasa antara laki-laki dan perempuan dalam ranah publik maupun privat, serta mengusung nilai-nilai keadilan, kesetaraan gender, dan penghormatan terhadap integritas tubuh perempuan. Sebaliknya, kampanye #NikahMuda lebih berpijak pada nilai-nilai konservatif yang mengidealkan pernikahan dini sebagai solusi terhadap problem moral generasi muda, serta sebagai manifestasi dari identitas keagamaan dan kultural yang menekankan pentingnya kesucian, stabilitas keluarga, dan penghindaran dari pergaulan bebas.

Kedua gerakan tersebut berangkat dari basis ideologis yang tidak hanya berbeda, tetapi juga seringkali berseberangan. Gerakan #MeToo merepresentasikan proyek emansipasi perempuan yang menantang status quo dan membuka ruang-ruang kritik terhadap institusi sosial yang menormalisasi subordinasi perempuan. Pendekatannya bersifat kritis dan kontekstual, mengidentifikasi pengalaman perempuan sebagai dasar pembacaan ulang terhadap struktur sosial yang timpang. Sementara itu, kampanye #NikahMuda justru menekankan pentingnya restorasi terhadap nilai-nilai tradisional yang dianggap telah terkikis oleh arus modernitas. Narasi yang dibangun dalam kampanye ini seringkali menempatkan perempuan dalam kerangka domestik dan moralistik, di mana nilai utama perempuan terletak

pada peran sebagai istri dan ibu. Dengan demikian, #MeToo dan #NikahMuda mencerminkan kontestasi antara ideologi progresif yang menuntut transformasi sosial, dan ideologi konservatif yang berupaya menjaga tatanan sosial yang dianggap sakral dan stabil.

Modal sosial yang menopang kedua gerakan ini pun menunjukkan konfigurasi yang kontras. Gerakan #MeToo didukung oleh jaringan sosial yang kuat di kalangan perempuan kelas menengah terdidik, kelompok feminis, serta komunitas akademik dan profesional yang memiliki akses terhadap ruang publik dan media. Gerakan ini memanfaatkan jejaring global dan solidaritas lintas negara untuk memperkuat suaranya serta membangun kekuatan kolektif. Sementara itu, #NikahMuda mendapatkan dukungan kuat dari komunitas religius, organisasi keagamaan, dan tokoh-tokoh masyarakat yang mengedepankan moralitas sebagai basis legitimasi sosial. Kampanye ini juga memiliki basis pendukung di kalangan remaja dan keluarga kelas menengah ke bawah, yang memandang pernikahan sebagai instrumen pengaman sosial dan jalan menuju stabilitas hidup, baik secara ekonomi maupun spiritual. Struktur modal sosial dalam #MeToo bersifat horizontal dan terbuka, sedangkan dalam #NikahMuda lebih bersifat vertikal dan normatif, dengan otoritas moral memainkan peran dominan.

Afiliasi kelas dan gender dalam kedua gerakan menunjukkan pola partisipasi yang juga berbeda. Gerakan #MeToo cenderung lebih inklusif terhadap isu keragaman gender dan mengedepankan perspektif interseksional, yaitu keterkaitan antara gender, ras, kelas sosial, dan orientasi seksual dalam memahami pengalaman ketidakadilan. Partisipan dalam gerakan ini umumnya berasal dari kelas menengah kota yang memiliki kesadaran kritis terhadap sistem sosial dan politik yang mendiskriminasi perempuan. Sebaliknya, kampanye #NikahMuda lebih menekankan homogenitas gender dan nilai-nilai patriarkal, dengan penekanan kuat pada kodrat perempuan sebagai istri yang tunduk pada suami serta ibu yang melayani keluarga. Perspektif ini cenderung mengabaikan keragaman pengalaman perempuan serta dinamika struktural yang memengaruhi pilihan hidup mereka, dan lebih sering menekankan keharmonisan keluarga sebagai solusi universal tanpa mempertimbangkan kompleksitas relasi kuasa dalam rumah tangga.

Efek sosial yang ditimbulkan oleh masing-masing gerakan mencerminkan arah perubahan sosial yang berbeda. Gerakan #MeToo telah memberikan kontribusi signifikan dalam meningkatkan kesadaran gender di masyarakat, mendorong reformasi hukum, dan membuka ruang percakapan tentang kekerasan seksual yang sebelumnya dianggap tabu. Gerakan ini berhasil membongkar praktik-praktik patriarki yang tersembunyi dalam institusi kerja, pendidikan, bahkan kehidupan sehari-hari, serta mendorong terciptanya lingkungan yang lebih aman dan setara bagi perempuan. Sebaliknya, kampanye #NikahMuda berpotensi mereproduksi dan melanggengkan norma tradisional yang menempatkan perempuan dalam posisi subordinat. Alih-alih membebaskan, kampanye ini seringkali mengabaikan

persoalan struktural seperti ketimpangan akses pendidikan, kemandirian ekonomi, dan kontrol perempuan atas tubuh serta masa depan mereka. Meskipun membawa semangat positif berupa penghindaran dari seks bebas dan pergaulan negatif, kampanye ini berisiko memperkuat narasi normatif yang membatasi pilihan hidup perempuan dalam kerangka moralitas yang kaku.

Relasi antara kedua gerakan ini tidak hanya memperlihatkan perbedaan strategi dan narasi, tetapi juga menunjukkan perbedaan arah tujuan sosial. Gerakan #MeToo berupaya menciptakan tatanan sosial baru yang lebih adil dan setara, di mana perempuan memiliki suara dan agensi dalam menentukan hidupnya. Gerakan ini bekerja melalui mekanisme pemberdayaan, kritik sosial, dan solidaritas lintas batas. Sebaliknya, kampanye #NikahMuda lebih condong kepada peneguhan nilai-nilai lama sebagai solusi atas kegelisahan moral masyarakat, tanpa banyak memberikan ruang untuk refleksi kritis terhadap ketimpangan struktural yang dialami oleh perempuan muda. Dengan demikian, komparasi antara #MeToo dan #NikahMuda mengungkapkan ketegangan ideologis antara semangat transformasi sosial dan dorongan pelestarian norma tradisional, serta menggambarkan bagaimana gerakan sosial berbasis gender tidak hanya berkaitan dengan isu perempuan, tetapi juga merupakan medan kontestasi antara visi yang berbeda tentang masa depan masyarakat.

Peran Media Sosial dalam Membentuk Arena Gerakan

Media sosial memiliki peran signifikan dalam membentuk arena gerakan sosial kontemporer, terutama melalui fungsinya sebagai fasilitator komunikasi dan mobilisasi kolektif. Namun, media sosial bukanlah penentu tunggal arah atau keberhasilan suatu gerakan, melainkan hanya menyediakan infrastruktur digital yang memungkinkan pertukaran informasi, pembentukan identitas kolektif, serta koordinasi aksi. Teknologi digital seperti media sosial mempercepat diseminasi pesan dan memperluas jaringan keterhubungan antar individu maupun kelompok, tetapi tetap tergantung pada kapasitas aktor sosial dalam mengartikulasikan aspirasi, menyusun narasi, dan mengorganisasi partisipasi (Sembiring and Manik 2025). Peran media sosial sebagai fasilitator ini tampak jelas dalam berbagai gerakan sosial global seperti Arab Spring, #MeToo, maupun #BlackLivesMatter, yang menunjukkan bagaimana media sosial mempercepat penyebaran informasi, mengaburkan batas geografis, serta memungkinkan partisipasi lintas ruang dan waktu. Namun, kapasitas tersebut bergantung pada strategi komunikasi digital yang dirancang oleh aktor gerakan dan kemampuan mereka untuk memanfaatkan affordance teknologi secara optimal.

Dominasi logika algoritmik dalam platform media sosial menghadirkan fenomena baru berupa fragmentasi informasi dan polarisasi opini, yang termanifestasi dalam bentuk filter bubble dan echo chamber. Filter bubble mengacu pada kondisi ketika pengguna hanya terpapar pada konten yang sesuai dengan preferensi sebelumnya, akibat personalisasi algoritma berdasarkan riwayat

pencarian dan interaksi daring (Harahap, Syahriza, and Faza 2024). Kondisi ini mempersempit ruang diskusi publik dan mengurangi kemungkinan pengguna terpapar pada pandangan yang berbeda, sehingga membentuk persepsi yang seolah-olah homogen dan mutlak. Echo chamber memperkuat kondisi tersebut melalui keterlibatan dalam komunitas daring yang hanya menguatkan opini dan nilai yang telah diyakini sebelumnya, tanpa membuka ruang untuk dialog kritis atau perbedaan pandangan. Akibatnya, pembentukan opini publik tidak berlangsung secara deliberatif dan inklusif, melainkan melalui proses repetisi informasi yang bersifat konfirmatif. Dalam konteks gerakan sosial, fenomena ini dapat memperkuat solidaritas internal dan mempercepat mobilisasi, tetapi juga berpotensi menimbulkan resistensi eksternal, distorsi informasi, serta menghambat terciptanya kesepahaman sosial yang lebih luas.

Algoritma memiliki peran sentral dalam menentukan jangkauan dan visibilitas isu yang diangkat dalam gerakan sosial. Algoritma platform seperti Facebook, Twitter, atau Instagram dirancang untuk memaksimalkan keterlibatan pengguna melalui seleksi konten yang dianggap relevan berdasarkan preferensi dan perilaku daring individu. Konsekuensinya, isu-isu yang viral atau memiliki daya tarik emosional tinggi lebih berpeluang muncul di lini masa pengguna, sementara isu yang dianggap kurang menarik oleh sistem algoritmik berpotensi tenggelam meskipun memiliki nilai sosial yang tinggi. Keputusan algoritmik ini bersifat tidak transparan dan seringkali tidak sejalan dengan kepentingan publik atau nilai keadilan sosial (Bakar and Manik 2024). Gerakan sosial yang memahami cara kerja algoritma dapat menyusun strategi komunikasi digital yang efektif, misalnya dengan menggunakan tagar populer, visual menarik, atau mengoordinasi kampanye daring secara masif untuk mengakali logika seleksi algoritmik. Akan tetapi, ketergantungan pada algoritma juga menciptakan ketimpangan dalam penyebaran isu, karena kelompok dengan sumber daya dan keahlian digital lebih tinggi memiliki peluang lebih besar dalam menguasai ruang wacana digital.

Keterhubungan antara teknologi, algoritma, dan dinamika gerakan sosial mencerminkan hubungan dialektis antara struktur dan agensi. Teknologi menyediakan struktur yang membuka kemungkinan baru, tetapi tidak secara otomatis menghasilkan perubahan sosial tanpa adanya intervensi agensi kolektif. Ruang digital menjadi arena perebutan makna, representasi, dan legitimasi, yang dipengaruhi oleh kekuatan simbolik maupun material aktor-aktor sosial di dalamnya (Harahap et al. 2024). Oleh karena itu, pemahaman kritis terhadap cara kerja media sosial menjadi penting bagi setiap gerakan sosial untuk menghindari determinisme teknologi yang berlebihan sekaligus mengoptimalkan potensi transformatif media digital. Upaya untuk memperluas jangkauan isu, membangun kesadaran kolektif, dan memperjuangkan keadilan sosial dalam ruang digital harus dilakukan dengan kesadaran terhadap batas dan risiko yang melekat pada sistem platform.

Keberhasilan gerakan sosial dalam memanfaatkan media sosial tidak semata ditentukan oleh teknologi itu sendiri, tetapi oleh strategi komunikasi, konsistensi narasi, dan kemampuan membangun jaringan solidaritas lintas komunitas. Inovasi dalam penyampaian pesan, keberanian melawan arus informasi dominan, serta kemampuan menciptakan ruang dialog yang inklusif menjadi elemen penting yang menentukan dampak gerakan dalam jangka panjang. Gerakan yang berhasil membongkar filter bubble dan menembus echo chamber memiliki peluang lebih besar untuk membentuk opini publik yang kritis dan reflektif. Oleh sebab itu, penguasaan literasi digital dan kesadaran terhadap dinamika algoritmik menjadi prasyarat strategis bagi setiap upaya advokasi sosial di era digital.

Pengaruh media sosial dalam membentuk arena gerakan sosial menandai transformasi ruang publik kontemporer yang kini tidak hanya bersifat fisik tetapi juga virtual. Kemampuan untuk mengartikulasikan gagasan, menjangkau khalayak luas, serta memobilisasi tindakan kolektif sangat dipengaruhi oleh desain sistem digital yang digunakan. Namun, kesadaran kritis terhadap keterbatasan teknologi, tantangan filter informasi, serta ketidaksetaraan akses dan visibilitas menjadi kunci penting agar media sosial tidak hanya menjadi medium ekspresi, tetapi juga alat perjuangan yang transformatif dan berkeadilan. Dengan demikian, media sosial harus diposisikan bukan sebagai entitas netral, melainkan sebagai medan kontestasi yang membutuhkan strategi, etika, dan keberanian dalam merumuskan masa depan sosial yang lebih adil dan partisipatif.

Penutup

Media sosial memainkan peran sentral sebagai medan kontestasi makna gender yang dinamis dan kompleks, tempat berbagai narasi mengenai identitas, peran, dan relasi kuasa antara laki-laki dan perempuan saling berhadapan dan bernegosiasi. Kampanye #MeToo dan #NikahMuda merupakan dua representasi gerakan sosial berbasis gender yang mencerminkan kutub orientasi yang berbeda. #MeToo membawa agenda emansipatoris yang menekankan pembebasan perempuan dari budaya patriarkis, kekerasan seksual, dan ketimpangan relasi kuasa, serta membangun solidaritas kolektif melalui kesaksian pribadi yang viral. Sebaliknya, kampanye #NikahMuda memperlihatkan orientasi konservatif yang menjunjung nilai keluarga tradisional, moralitas agama, dan peran domestik perempuan sebagai bentuk stabilitas sosial. Kedua kampanye ini menunjukkan bahwa media sosial bukan hanya medium ekspresi individu, melainkan juga ruang publik digital tempat perdebatan ideologis dan hegemoni simbolik berlangsung secara intens. Dinamika ini memperlihatkan pentingnya pendekatan sosiologis dalam memahami bagaimana media sosial membentuk, mereproduksi, atau bahkan menantang konstruksi sosial tentang gender. Pemahaman tersebut dapat membuka ruang refleksi kritis terhadap cara masyarakat menyikapi perubahan sosial berbasis gender serta memperkuat kapasitas literasi digital masyarakat dalam menghadapi arus informasi yang ideologis. Sebagai saran, diperlukan kajian lanjutan yang

menggali lebih dalam respons masyarakat terhadap dua kutub gerakan ini, serta bagaimana narasi gender terbentuk dan dipertahankan melalui interaksi digital dalam konteks budaya lokal dan global.

Daftar Pustaka

- Al Akash, Ruba, and Morgen A. Chalmiers. 2021. "Early Marriage among Syrian Refugees in Jordan: Exploring Contested Meanings through Ethnography." *Sexual and Reproductive Health Matters* 29(1):287–302. doi: 10.1080/26410397.2021.2004637.
- Armstrong, Cory L., and Jessica Mahone. 2023. "#Metoo in Practice: Revisiting Social Media's Influence in Individual Willingness to Mobilize against Sexual Assault." *Feminist Media Studies* 23(1):185–98. doi: 10.1080/14680777.2021.1944258.
- Bakar, Abu, and Zulfirman Manik. 2024. "Hadith Content About Women on Instagram: Analysis of Religious Account Strategies to Attract Followers." *Al-Fikru: Jurnal Ilmiah* 18(2):173–91. doi: 10.51672/alfikru.v18i2.441.
- Bao, Jingran. 2025. "On the Impact of Social Media on the Dissemination of Gender Equality Ideology." *Journal of Education, Humanities and Social Sciences* 51:194–99. doi: 10.54097/v1rbc738.
- Bwirire, Dieudonne, Rik Crutzen, Edmond Ntabe Namegabe, Rianne Letschert, and Nanne de Vries. 2022. "Health Inequalities in Post-Conflict Settings: A Systematic Review." *PLoS ONE* 17(3 March):1–22. doi: 10.1371/journal.pone.0265038.
- Franssen, Gaston. 2020. "Celebrity in the #MeToo Era." *Celebrity Studies* 11(2):257–59. doi: 10.1080/19392397.2020.1751493.
- Gibson, Camille, Shannon Davenport, Tina Fowler, Colette B Harris, Melanie Prudhomme, Serita Whiting, and Sherri Simmons-Horton. 2019. "Understanding the 2017 'Me Too' Movement's Timing." *Humanity & Society* 43(2):217–24. doi: 10.1177/0160597619832047.
- Harahap, Alwi Padly, Khairin Nazmi, and M. Fajri Yusuf. 2025. "Kontekstualisasi Hadis Tentang Puasa Dan Relevansinya Dalam Mencegah Pelecehan Seksual Terhadap Perempuan Di Indonesia." *Al Qalam: Jurnal Ilmiah Keagamaan Dan Kemasyarakatan* 19(1):119–38. doi: 10.35931/aq.v19i1.4006.
- Harahap, Alwi Padly, Rahmi Syahriza, and Asrar Maburur Faza. 2024. "The Transformation of Understanding Hadith in the Post-Multimedia Era: Balancing Technological Advancements with Tradition Preservation." *Jurnal Living Hadis* 9(2):1–21. doi: 10.14421/livinghadis.2024.5798.
- Is, Fadhillah, Alwi Padly Harahap, and Manal Mohey Eddien Sharief. 2025. "The Concept Of Family Resilience Towards The Issue Of Infidelity In Households: Analysis of the Hadith Al-Ifki." *TAJIDID: Jurnal Ilmu Ushuluddin* 24(1):80–107. doi: 10.30631/tjd.v24i1.568.
- Lall, Ruchika, Rashee Mehra, and Malavika Narayan. 2023. "Co-Producing Knowledge in Action: Reflecting from the Main Bhi Dilli Campaign for Equitable Planning in Delhi." *Planning Theory* 23(4):356–76. doi:

10.1177/14730952231184339.

Muslikhati, Siti. 2004. *Feminisme Dan Pemberdayaan Perempuan Dalam Timbangan Islam*. Jakarta: Gema Insani Press.

Nazmi, Khairin, Tutia Rahmi, and Alwi Padly Harahap. 2025. "Keutuhan Harmoni Rumah Tangga Perspektif Hadis: Menghindari Stigma Sosial Di Aplikasi Tiktok Sebagai Standar Kebahagiaan Keluarga." *Al Qalam: Jurnal Ilmiah Keagamaan Dan Kemasyarakatan* 19(1):358–75. doi: 10.35931/aq.v19i1.4358.

Nurhayati, Sri Suci, and Filosa Gita Sukmono. 2022. "Gender Advocacy, Social Media Campaign to Against Sexual Violence." Pp. 76–82 in *HCI International 2022 – Late Breaking Posters*, edited by C. Stephanidis, M. Antona, S. Ntoa, and G. Salvendy. Cham: Springer Nature Switzerland.

Ritonga, Nuh Ahmad Syarodzi, Muhammad Darmawan Saputra, Noval Al Nafiz Siregar, Alwi Padly Harahap, and Uqbatul Khair. 2023. "Efektivitas Bimbingan Untuk Calon Pengantin Dalam Mewujudkan Keluarga Yang Sakinah Di Kantor KUA Tembung Kecamatan Percut Sei Tuan." *As-Syar'i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga* 5(2):560–68. doi: 10.47467/as.v5i2.2803.

Sembiring, Muhammad Ismailsyah, and Zulfirman Manik. 2025. "INSTAGRAM AS A STAGE FOR PREACHING: Exploring the Values of Hadith in Buya Syakur's Sufi Advice." *TAJDID: Jurnal Ilmu Ushuluddin* 24(1):50–79. doi: 10.30631/tjd.v24i1.567.

Stier, Sebastian, Arnim Bleier, Haiko Lietz, and Markus Strohmaier. 2018. "Election Campaigning on Social Media: Politicians, Audiences, and the Mediation of Political Communication on Facebook and Twitter." *Political Communication* 35(1):50–74. doi: 10.1080/10584609.2017.1334728.

Zeng, Jing. 2020. "#MeToo as Connective Action: A Study of the Anti-Sexual Violence and Anti-Sexual Harassment Campaign on Chinese Social Media in 2018." *Journalism Practice* 14(2):171–90. doi: 10.1080/17512786.2019.1706622.